



**AGROFORESTRI SEBAGAI BAGIAN SKEMA PEMECAHAN MASALAH
PENGELOLAAN LAHAN KHDTK KEPAU JAYA**
*(Agroforestry As A Problem Solving Scheme For KHDTK Kepau Jaya Land
Management)*

Andhika Silva Yunianto¹ dan Hery Kurniawan²

¹Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gedung B.J. Habibie, jln. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

²Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gedung B.J. Habibie, jln. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

ABSTRACT

Almost all KHDTK in Indonesia have problems such as encroachment, conversion of area function, and claims made by irresponsible parties from the irresponsible parties. One example happened in KHDTK Kepau Jaya, due to the government's lack of attention to the community around the area. The development and management of KHDTK should be focused on the empowerment efforts to increase the community capacity around KHDTK Kepau Jaya. This research aims to get information about communities' socio and economic conditions around KHDTK Kepau Jaya and agroforestry as land management problem-solving. This research was conducted from July 2019 to December 2019 by interviews with 31 respondents selected by purposive sampling and qualitatively analyzed. The results showed that the average income level of respondents is IDR. 1,500,000 – IDR. 2,000,000, still under Rp. 2.718.724,80, the number of UMK (district minimum wage) Kampar Regency in 2019. Low community economy can be overcome by community empowerment activities through agroforestry systems so that community can get additional income. Besides that, community forest management can improve the security of forest areas through efforts to change the function of forest areas.

Keywords: Agroforestry, social condition, economic condition, KHDTK, conflict resolution

ABSTRAK

Hampir seluruh KHDTK yang ada di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan seperti perambahan, alih fungsi kawasan maupun klaim yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satunya terjadi di KHDTK Kepau Jaya, akibat kurangnya perhatian dari Pemerintah terhadap masyarakat sekitar kawasan. Pembangunan dan pengelolaan KHDTK seharusnya menitikberatkan pada upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan KHDTK Kepau Jaya dan peran agroforestri dalam pemecahan masalah pengelolaan lahan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019, dengan mewawancarai sebanyak 31 responden yang dipilih secara *purposive sampling* dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat sebesar Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000, masih dibawah UMK Kabupaten Kampar sebesar Rp. 2.718.724,80 pada tahun 2019. Rendahnya perekonomian masyarakat dapat ditanggulangi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola agroforestri sehingga masyarakat memperoleh tambahan penghasilan. Selain itu, pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat dapat meningkatkan keamanan kawasan hutan dari upaya-upaya alih fungsi kawasan hutan.

Kata kunci: Agroforestri, kondisi sosial, kondisi ekonomi, KHDTK, resolusi konflik

Article Info

- *Corresponding Author : andh008@brin.go.id (Andhika Silva Yunianto)
Articel History : Received 18 March 2022; received in revised from 28 March 2022; accepted 20 April 2022; Available online since 30 April 2022
How to cite this article : Yunianto, Andhika Silva., Kurniawan, Hery (2022). Agroforestri sebagai bagian skema pemecahan masalah pengelolaan lahan KHDTK Kepau Jaya. *Jurnal Penelitian Kehutanan Faloak*, 6(1):1-15. DOI : <http://doi.org/10.20886/jpkf.2022.6.1.1-15>

Read Online



Scan this QR code by
your mobile device
to read online



©JPKF-2021. Open access under CC BY-NC-SA license

I. PENDAHULUAN

Eksistensi KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) sebagai salah satu sarana penelitian dan pengembangan kehutanan tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam permasalahan, seperti perambahan, alih fungsi kawasan maupun sertifikasi yang dilakukan oleh oknum yang merasa memiliki lahan di dalam kawasan. Permasalahan umum yang terjadi dalam pengelolaan KHDTK yang ada di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan (Harun & Dwiprabowo, 2014; Ichsan *et al.*, 2013; Wakka, 2014; Wakka & Bisjoe, 2018). KHDTK Kepau Jaya merupakan salah satu KHDTK yang turut terkena berbagai permasalahan tersebut, contohnya adalah adanya dugaan tindak pidana di bidang kehutanan oleh perusahaan perkebunan sawit yang mengerjakan dan atau menggunakan ataupun menduduki kawasan hutan secara tidak prosedural seluas 560,16 Ha. Lahan tersebut merupakan kebun kelapa sawit tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Prasetyo, 2015). Selain konflik dengan perusahaan, terdapat juga konflik dengan masyarakat berupa perambahan/penyerobotan lahan yang dilakukan oleh masyarakat asli ataupun pendatang untuk di konversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Konflik di areal KHDTK Kepau Jaya terjadi karena tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat berargumen bahwa apabila perusahaan dapat membangun perkebunan di dalam kawasan hutan, maka

mereka pun juga berhak untuk melakukan hal serupa (Yunianto & Raharjo, 2019). Hal tersebut menimbulkan upaya penguasaan lahan oleh masyarakat melalui alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Beberapa faktor yang memiliki kontribusi nyata dalam konflik pemanfaatan sumberdaya hutan adalah adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh peraturan yang tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, perizinan yang tidak terkoordinasi (seringkali ilegal) dan prosedur perizinan terkait batas tata kelola kawasan hutan, serta meningkatnya permintaan global untuk lahan (Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), 2016).

Permasalahan konflik tenurial dan status kawasan hutan pada dasarnya merupakan dua elemen yang tidak dapat terpisahkan. Istilah tenurial mencakup substansi dan jaminan atas hak. Sebagai sumber daya publik, hak tenurial terhadap hutan mencakup hak akses, hak pakai, hak eksklusif dan hak pengalihan (Larson, 2013). Data yang dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa konflik tenurial di sektor kehutanan diketahui mencapai 201 kasus di Sumatera (Ekawati, 2019). Rendahnya akomodasi dan kepastian hak merupakan penyebab umum timbulnya konflik tenurial (Mayers *et al.*, 2013). Padahal, pembangunan dan pengelolaan hutan seharusnya menitikberatkan pada upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan hutan yang telah tinggal dan menetap sejak lama serta memiliki hubungan interaksi dan sangat bergantung pada sumberdaya yang ada di dalam hutan (Reski *et al.*, 2017).

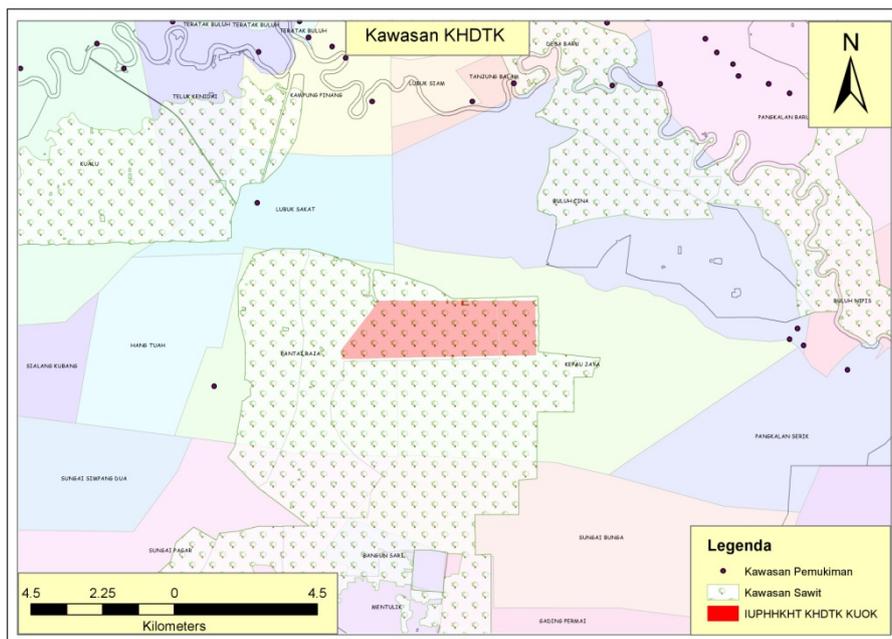
Pembangunan tidak mungkin dihentikan karena diperlukan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi. Permasalahan yang muncul adalah banyak lahan garapan pertanian baru di kawasan hutan yang dikelola secara sporadis oleh masyarakat setempat. Agroforestri, telah tersebar luas di seluruh wilayah tropis sebagai bentuk penggunaan lahan secara tradisional yang dikembangkan oleh petani subsisten dan juga sebagai pilihan mata pencaharian penting yang dipromosikan oleh pengelola tata guna lahan dan lembaga-lembaga internasional (Zomer *et al.*, 2014). Pengembangan agroforestri mempunyai prospek yang cukup baik dalam kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan petani sehingga mempermudah akses terhadap pangan disamping menjaga keamanan dan kelestarian hutan bersama masyarakat atau petani sekitar hutan (Mayrowani, 2011). Agroforestri diyakini mampu memberikan sumbangan terhadap upaya mengatasi masalah kerusakan lingkungan dan sekaligus sebagai salah satu pendekatan dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (Rajati *et al.*, 2006).

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar KHDTK Kepau Jaya dan peran agroforestri dalam pemecahan masalah

pengelolaan lahan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan upaya-upaya pengelolaan yang dapat dilakukan serta program-program kegiatan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan KHDTK Kepau Jaya. Penyelesaian permasalahan di KHDTK Kepau Jaya tidak dapat diselesaikan sendiri, namun membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar KHDTK Kepau Jaya, serta untuk mengetahui sejauh mana kontribusi agroforestri dalam pemecahan masalah konflik tenurial di KHDTK Kepau Jaya.

II. METODE PENELITIAN

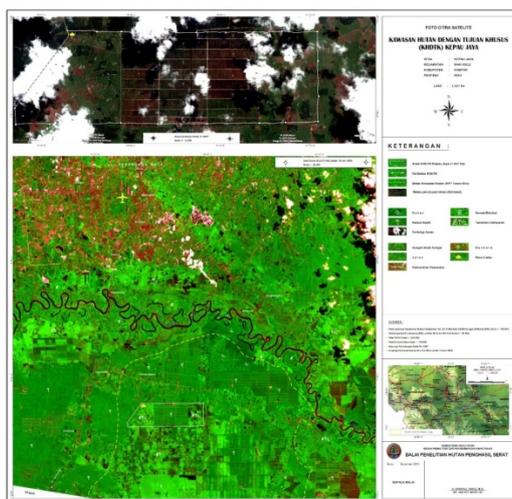
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019 di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu Desa Kepau Jaya yang berbatasan langsung dengan KHDTK Kepau Jaya (Gambar 1).



Gambar 1. Peta tutupan lahan KHDTK Kepau Jaya (BPKH Pekanbaru, 2016)
Figure 1. Land cover map of KHDTK Kepau Jaya (BPKH Pekanbaru, 2016)

Secara administratif, KHDTK Kepau Jaya terletak di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sedangkan secara geografis, terletak di 101° 26' 41" – 101° 29' 27" BT dan 00° 18' 53" – 00° 17' 44" LU. Luas KHDTK Kepau Jaya berdasarkan SK Menhut nomor 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 adalah seluas

1.027 Ha. Sekitar 90% dari total luas kawasan, telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta maupun masyarakat sekitar kawasan hutan (Gambar 2), dan sebagian merupakan lahan terbuka yang ditumbuhi oleh semak belukar dan alang-alang (Kurniasih & Sudarmalik, 2013).



Gambar 2. Kondisi KHDTK Kepau Jaya di ambil dari citra satelit (BP2TSTH, 2018)
Figure 2. The condition of KHDTK Kepau Jaya taken from satellite images (BP2TSTH, 2018)

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di sekitar KHDTK Kepau Jaya. Peralatan yang digunakan meliputi alat perekam yang digunakan untuk wawancara, kamera, alat tulis dan kuisisioner bersifat terbuka sebagai panduan wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 31 orang dan wawancara menggunakan kuisisioner dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan responden terpilih. Metode survei dapat dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan menggunakan kuisisioner, wawancara, observasi langsung atau kombinasinya (Nasution, 2011). Pemilihan responden dilakukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden berdasarkan keterkaitan responden terhadap KHDTK Kepau Jaya, yang terdiri atas anggota kelompok tani, perangkat desa dan tokoh agama yang berdomisili di sekitar KHDTK Kepau Jaya.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam secara terstruktur yang dilakukan menggunakan kuisisioner terhadap narasumber. Data yang dikumpulkan dalam wawancara seperti data sosial ekonomi masyarakat meliputi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pendapatan ekonomi, dll. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, data monografi desa yang diperoleh dari perangkat desa ataupun instansi pemerintah terutama terkait dengan jumlah rata-rata penduduk di desa, jumlah fasilitas pendidikan, kelembagaan kelompok tani yang ada di desa, serta data

dari pengelola KHDTK Kepau Jaya terkait dengan rencana pengelolaan.

Wawancara mendalam memiliki karakteristik awal dan akhir yang tidak terlihat jelas, pertanyaan diajukan sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan (Nurdiani, 2014). Peneliti menggali informasi secara mendalam dan bertanya jawab secara bebas mengikuti norma yang berlaku (Rahardjo, 2011). Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti mata pencaharian, penghasilan dan pengeluaran rutin masyarakat, interaksi masyarakat terhadap kawasan hutan. Data ini diperlukan untuk keberlanjutan kegiatan yang akan dilakukan.

Data dan informasi yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif meliputi data pendidikan, pendapatan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis teks dari hasil kuesioner dan catatan yang diperoleh dari lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Masyarakat Sekitar KHDTK Kepau Jaya

KHDTK Kepau Jaya berada di Desa Kepau Jaya, sehingga data masyarakat yang di ambil merupakan masyarakat yang bermukim di sekitar KHDTK Kepau Jaya yang berada di Desa Kepau Jaya. Karakteristik individu merupakan identitas yang dimiliki secara individu oleh seseorang yang terdiri atas umur, tingkat pendidikan formal, dll (Yuwono & Prasodjo, 2013).

Tabel 1. Karakteristik sosial responden
Table 1. Social characteristics of respondents

Karakteristik responden <i>(Characteristics of respondents)</i>	Klasifikasi (Classification)	Jumlah responden <i>(Amount of respondent)</i>	Persentase <i>(Percentage)</i> (%)
Jenis kelamin (Sex)	Laki – laki (<i>Male</i>)	18	58,06
	Perempuan (<i>Female</i>)	13	41,94
Agama (Religion)	Islam (<i>Moslem</i>)	31	100,00
Etnis (Ethnic)	Jawa	14	45,16
	Batak	13	41,94
	Melayu	2	6,45
	Aceh	2	6,45
Umur (Age)	Variasi umur (<i>Age variation</i>)		
Umur produktif (Productive age)	18 - 37 Tahun (<i>Years</i>)	15	48,39
	38 – 55 Tahun (<i>Years</i>)	15	48,39
Umur non produktif (Non productive age)	>55 Tahun (<i>Years</i>)	1	3,23
Jumlah anggota keluarga (Number of family member)	<4 Orang (<i>Persons</i>)	10	32,26
	4 Orang (<i>Persons</i>)	9	29,03
	>4 Orang (<i>Persons</i>)	12	38,71
Tingkat pendidikan formal (Level of normal education)	SD (<i>Elementary School</i>)	13	41,94
	Rendah (<i>Low</i>)		
	SLTP – SLTA (<i>High School</i>)	18	58,06
	Sedang (<i>Medium</i>)		
Penduduk (Habitant)	PT (<i>University</i>) Tinggi (<i>High</i>)	0	0
	Asli (<i>Native</i>)	10	32,26
Penduduk penerima program Transmigrasi (Recipients of the Transmigration program)	Pendatang (<i>Migrant</i>)	21	67,74
	Ya (<i>Yes</i>)	3	9,68
	Tidak (<i>No</i>)	28	90,32

Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini terdiri atas 18 orang berjenis kelamin laki-laki (58,06%) dan 13 orang berjenis kelamin perempuan (41,94%). Dalam hal ini, perempuan dapat dijadikan sebagai responden karena perannya dapat diperhitungkan, terutama yang berkaitan dengan proses ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam semua aktivitas proses ekonomi mengindikasikan kontribusi waktu yang dicurahkan cukup tinggi karena keterbukaan menerima kemauan dan kemampuan. (Hutajulu (2015) menyebutkan bahwa perempuan dapat diterima terlibat langsung tanpa mengganggu aktivitas kodratnya sebagai Ibu Rumah Tangga dalam

mengerjakan pekerjaan. Hal ini mampu mendorong terciptanya keluarga yang mandiri karena perempuan sebagai sumberdaya manusia yang dapat mengelola ekonomi.

Berdasarkan tabel 1, keseluruhan responden merupakan masyarakat beragama Islam (100%), karena agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di sekitar KHDTK Kepau Jaya. Reza, *et al.* (2019) menyebutkan bahwa ikatan atas dasar kesamaan agama merupakan perekat dari tindakan-tindakan antar anggota seperti tolong menolong dan rasa saling percaya.

Umur responden dalam penelitian kali ini sangat bervariasi, umur terendah yaitu 19

tahun dan umur tertinggi yaitu 66 tahun, dengan rata-rata umur responden yaitu 37 tahun. Sebagian besar responden berada pada tingkatan umur yang tergolong produktif, yaitu 18 – 55 tahun. Struktur umur penduduk dikelompokkan menjadi 3 (tiga): (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15 – 64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas (Tjiptoherijanto, 2001). Jumlah responden yang masih tergolong produktif berjumlah 30 orang (96,77%), sedangkan responden yang berada pada golongan umur tidak produktif berjumlah 1 orang (3,23%) yaitu berusia 66 tahun. Berdasarkan data tersebut, sebagian responden masih berpotensi untuk beraktivitas secara maksimal agar dapat menambah penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Pada fenomena masyarakat berusia tua dianggap sebagai tenaga kerja yang kurang fleksibel dan menolak terhadap kemajuan teknologi pada jaman sekarang. Kondisi fisik yang kian menurun juga dianggap mempengaruhi produktivitas dan kinerja (Shafira & Listiara, 2017). Dengan umur dominan masyarakat/responden yang tergolong produktif diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam pengelolaan KHDTK Kepau Jaya.

Data pada tabel 1 juga menggambarkan kondisi jumlah anggota keluarga setiap responden. Data ini diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan tenaga kerja, tanggungan hidup keluarga dan besarnya pendapatan keluarga (Mulyono, 2012). Selain itu, jumlah anggota keluarga juga memengaruhi tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga. Jumlah tanggungan keluarga dapat memengaruhi semangat dan kreativitas kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya (Wakka *et al.*, 2012). Berdasarkan tabel 1, data pengklasifikasian jumlah anggota keluarga kurang dari 4 orang, 4 orang dan lebih dari 4 orang. Jumlah anggota keluarga yang kurang dari 4 orang sebanyak 10 responden (32,26%), jumlah anggota keluarga dengan empat orang sebanyak 9 responden (29,03%) dan jumlah anggota keluarga yang lebih dari 4 orang sebanyak 12 responden (38,71%). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, diperoleh data bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Desa Kepau Jaya adalah sebanyak 4 orang (BPS Kabupaten Kampar, 2018).

Tingkat pendidikan merupakan salah satu parameter tingkat kesejahteraan yang digunakan, sehingga dapat dilihat kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anggota keluarga mereka. Adapun untuk masyarakat dengan kategori sejahtera, mampu menyekolahkan anggota keluarganya sampai ke tingkat perguruan tinggi (S1) sedangkan yang lainnya hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai SMP/SMU (Ichsan *et al.*, 2013).

Mayoritas responden dengan tingkat pendidikan formal tergolong sedang, yaitu sebanyak 58,06% responden berpendidikan SLTP – SLTA. Hanya 41,94% responden berpendidikan rendah yang mampu maupun tidak mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat SD. Tidak dijumpai responden yang mampu menyelesaikan pendidikan formal hingga perguruan tinggi (PT). Tingkat pendidikan formal masyarakat yang tergolong sedang, menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar KHDTK Kepau Jaya belum sejahtera. Tingkat pendapatan masyarakat yang kecil atau dibawah UMK menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak mampu

melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor pendapatan ini juga yang mendorong masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Tingkat pendidikan formal masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya termasuk ke dalam kategori sedang juga diakibatkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Desa Kepau Jaya dengan luasan wilayah yaitu 11.416 km², memiliki 3 SD (2 Negeri dan 1 Swasta), 2 SLTP (1 Negeri dan 1 Swasta), namun tidak memiliki SLTA (BPS Kabupaten Kampar, 2018). Jarak yang jauh ke pusat pemerintahan kabupaten yaitu 45 km, merupakan penghambat bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Salah seorang informan menyampaikan bahwa pendidikan sangatlah penting. Namun, jarak menjadi salah satu faktor pertimbangan mereka untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Jarak yang jauh membuat mereka lebih memilih mempekerjakan anak untuk menambah perekonomian keluarga. Biaya pendidikan yang tinggi serta kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah menjadi penyebab utama masyarakat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Adalina *et al.*, 2015).

Senoaji (2011) menyebutkan bahwa kualitas sumberdaya manusia juga ditentukan oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Hamid *et al.*, 2011). Sementara itu, (Garsetiasih & Alikodra, 2015) menyatakan bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, dapat dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi bentuk persepsi masyarakat dan bentuk partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan (Diarto *et al.*, 2012).

Mayoritas responden (67,74%) merupakan masyarakat pendatang dari luar wilayah Desa Kepau Jaya, namun ada beberapa responden yang sudah menetap sejak lama di wilayah tersebut. Tingkat migrasi penduduk ke wilayah Desa Kepau Jaya sangat tinggi, hal ini dikarenakan wilayah Kepau Jaya merupakan wilayah yang dipilih oleh pemerintah melalui Dinas Sosial sebagai wilayah penerima program HTI transmigrasi untuk masyarakat dari Aceh, Sumatera Utara dan Jawa (Yunianto & Raharjo, 2019). Tetapi beberapa informasi yang diterima dari pihak pengelola lapangan KHDTK Kepau Jaya juga menyebutkan ada beberapa masyarakat yang masuk ke kawasan untuk melakukan okupasi lahan hutan. Mereka melakukan okupasi untuk dijadikan kebun kelapa sawit, kemudian diperjualbelikan ke pihak lain.

Padahal, masyarakat lokal dinilai sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya pengelolaan kawasan hutan, sebab merekalah yang paham dan bersentuhan langsung dengan kawasan hutan yang ada disekitarnya (Amal *et al.*, 2020). Masyarakat pendatang juga memiliki peran yang sangat penting terutama terkait dengan kontribusi terhadap pengembangan wilayah serta akulturasi ilmu pengetahuan di bidang budidaya pertanian dan kehutanan dengan masyarakat asli.

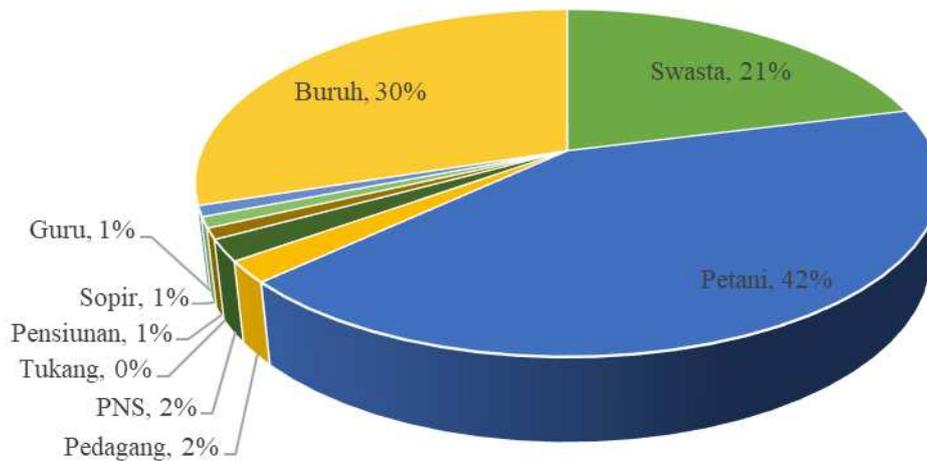
B. Kondisi Ekonomi Masyarakat Sekitar KHDTK Kepau Jaya

Masyarakat yang menetap di sekitar KHDTK Kepau Jaya pada umumnya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Kampar tahun 2017, menunjukkan bahwa sebanyak

41,81% masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, 30,11% sebagai buruh tani, dan 21,38 masyarakat sebagai wiraswasta, selebihnya (6,70%) memiliki mata pencaharian bervariasi seperti pedagang dan ASN. Mata pencaharian masyarakat yang dominan sebagai petani, menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya terhadap lahan sangat tinggi.

Ketergantungan masyarakat terhadap lahan di lokasi penelitian sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, untuk kalangan masyarakat menengah kebawah dengan keterbatasan ekonomi dan keahlian masyarakat sebagai petani, membuat masyarakat bekerja di lahan milik orang lain.

Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai buruh di lahan tersebut ataupun memanfaatkan lahan kosong untuk dilakukan budidaya tanaman semusim. Terdapat tiga jenis lahan garapan petani, yaitu lahan andil HKm, lahan milik (sawah, ladang, pekarangan dan hutan rakyat serta lahan bukan milik seperti tanah kas desa, lahan sewa, dan lahan milik kerabat (Dewi *et al.*, 2018). Berdasarkan pengamatan dilapangan juga dijumpai masyarakat yang mencari pakan ternak dari areal sekitar KHDTK Kepau Jaya. Kegiatan ini umumnya dilakukan pada pagi dan sore hari. Jenis pakan ternak yang diambil umumnya merupakan tumbuhan bawah.



Gambar 3. Diagram mata pencaharian masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya
Figure 3. Livelihood diagram of the community around KHDTK Kepau Jaya

Berdasarkan hasil analisis dilapangan, sebagian besar responden memiliki mata pencaharian yang bergerak di bidang pertanian, namun peran masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya hanya sebagai penggarap saja, bukan pemilik lahan. Hal ini tentunya sesuai dengan kearifan lokal masyarakat yang merupakan masyarakat pendatang dari wilayah Aceh, Sumatera Utara dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Mayoritas pendatang dari Aceh dan Sumatera Utara merupakan keturunan Jawa yang sudah lama

menetap di daerah asalnya karena mengikuti program transmigrasi. Pada awal masa kehidupan masyarakat transmigrasi mereka hanya dibekali lahan untuk ditanami tanaman keras maupun bercocok tanam palawija. Seiring berjalannya waktu, selain bermata pencaharian sebagai petani, juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil hingga buruh harian lepas (Ardiyansyah, 2018).

Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan daerah asal
Table 2. Number of respondents based on area of origin

Klasifikasi (Classification)	Jumlah responden (Amount of respondent)	Persentase (Percentage) (%)
Jawa	14	45,16
Batak	13	41,94
Melayu	2	6,45
Aceh	2	6,45

Luas lahan garapan yang dimiliki oleh masyarakat masih sangat rendah, bahkan banyak petani yang tidak memiliki lahan dan hanya sebagai buruh tani saja. Hal demikian tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang masih berkekurangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para responden, diperoleh data bahwa penghasilan masyarakat rata-rata tiap bulannya yaitu sebesar Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000. Nominal tersebut sangat jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019 Kabupaten Kampar seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.949/XI/2018, yaitu sebesar Rp. 2.718.724,80.

Informasi yang diperoleh dari responden menyebutkan bahwa setidaknya dalam 1 bulan

mereka membutuhkan sedikitnya Rp. 2.500.000 untuk keperluan makan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Untuk menutupi kekurangan keuangan, dengan cara mencari pekerjaan lainnya seperti turut serta dalam kegiatan memanen buah kelapa sawit, ikut bekerja pada kegiatan pembangunan rumah, musholla, dll. Tak jarang mereka juga meminta bantuan dari orang lain untuk meminjam sejumlah uang. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong sedang, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan diluar keahlian mereka karena tidak memiliki keterampilan khusus dan kemampuan bersaing, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Penghasilan dari sektor pertanian yang tidak menentu karena dipengaruhi oleh

faktor cuaca dan pasar terkait dengan penawaran serta permintaan barang.

C. Agroforestri Sebagai Skema Resolusi Konflik

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan guna keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta kepentingan religi dan budaya setempat, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada amanat UU No. 41 tahun 1999.

Pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan masyarakat terkadang menyimpang dari aturan yang berlaku, seperti menebang pohon untuk diambil kayunya, membuka kawasan hutan untuk dijadikan areal perkebunan. Perilaku masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya dalam memanfaatkan kawasan hutan berupa aktivitas pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan terutama komoditas kelapa sawit sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang berlaku terkait dengan KHDTK. Hanya saja, apa yang sebagian besar masyarakat lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena semakin terbatasnya lahan pertanian.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya yang demikian, ditambah dengan terbatasnya alternatif pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tentunya menimbulkan berbagai permasalahan dan tekanan terhadap KHDTK Kepau Jaya (Yunianto & Sutrisno, 2019). Hal yang perlu dilakukan adalah mengarahkan dan membina masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya melalui kegiatan penyuluhan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam bertani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk meminimalisir terjadinya konflik

berkepanjangan, di KHDTK Kepau Jaya telah terbangun demplot pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan skema agroforestri. Demplot dengan luasan 2,7 hektar ini dikelola secara bersama-sama antara pihak pengelola dengan Kelompok Tani Hutan binaan dan didampingi oleh tim peneliti dari BP2TSTH. Jenis tanaman pokok yang digunakan adalah tanaman Gelam (*Melaleuca sp.*), Geronggang (*Cratoxylon arborescens*) dan Belangeran (*Shorea balangeran*). Sedangkan jenis tanaman semusim yang di tanam oleh kelompok tani adalah jenis Melon (*Cucumis melo*), Gambas (*Luffa acutangula*), Cabai (*Capsicum annum*), Ubi Kayu (*Manihot utilissima*), Kacang Panjang (*Vigna unguiculata*), dan lainnya. Sejalan dengan pernyataan Rajati *et al.* (2006), agroforestri sebagai salah satu bentuk penggunaan lahan, diyakini mampu memberikan sumbangan terhadap upaya mengatasi masalah kerusakan lingkungan dan sekaligus sebagai salah satu pendekatan dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Ketua KTH binaan BP2TSTH menyampaikan bahwa untuk luasan 1/8 hektar yang dikelolanya dan diperuntukkan bagi tanaman Melon, mampu menghasilkan keuntungan bersih 5 – 6 juta rupiah per periode panen. Kondisi ini berbeda dengan sebagian besar petani di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT yang lebih bersifat subsisten (Kurniawan & Pujiono, 2018), hasil pertanian KTH binaan BP2TSTH mampu mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan sekedar pangan.

Selain itu, pengelolaan kawasan KHDTK Kepau Jaya perlu di arahkan menuju pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekologiannya. Kedepannya, pemanfaatan HHBK

yang dapat diupayakan di KHDTK Kepau Jaya adalah budidaya lebah penghasil madu. Beberapa stup/koloni sudah diletakkan di areal KHDTK Kepau Jaya, namun jumlahnya masih sangat minim. Jenis tanaman yang dominan adalah kelapa sawit, dengan keberagaman jenis yang sangat minim. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ketersediaan pakan bagi lebah madu tersebut. Harapannya, dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di demplot agroforestri, jenis pakan lebah akan semakin beragam sehingga lebah madu mampu berkembang biak di KHDTK Kepau Jaya. Budidaya lebah madu dengan memanfaatkan lahan KHDTK yang dikelola dengan pola agroforestri sudah dilakukan di KHDTK Wonogiri, dalam 1 tahun mereka mampu menghasilkan madu sebanyak 250 liter dari 500 stup (Mochtar, 2015).

Masyarakat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non-kayu yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi (Safe'i *et al.*, 2018). Apabila usaha pelestarian hutan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat tidak akan mau untuk berpartisipasi, sebaliknya selama masyarakat masih bisa merasakan manfaat dari keberadaan kawasan hutan, masyarakat akan terus ikut berpartisipasi (Yanto, 2013). Selain itu, tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi bentuk persepsi masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, lahan demplot agroforestri yang terdapat di KHDTK Kepau Jaya terbukti mampu mengatasi permasalahan tenurial yang ada di KHDTK Kepau Jaya. Dengan adanya aktivitas kelompok tani yang melakukan pengolahan lahan sekaligus dapat membantu menjaga kawasan dari gangguan seperti penebangan liar

maupun pengrusakan tanaman yang sudah di tanam untuk penghijauan.

IV. KESIMPULAN

Tingkat pendidikan yang tergolong sedang membuat kondisi perekonomian masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya tergolong rendah karena masih berada dibawah standar UMK Kabupaten Kampar. Keahlian masyarakat di sektor pertanian dapat menjadi daya dukung bagi pengelola KHDTK Kepau Jaya untuk melakukan pengelolaan hutan bekerja sama dengan masyarakat sekaligus dapat menurunkan intensitas konflik pemanfaatan sumberdaya hutan. Rendahnya perekonomian masyarakat dapat ditanggulangi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola agroforestri sehingga masyarakat memperoleh tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kegiatan demplot agroforestri KHDTK menjadi acuan bahwa masyarakat dapat menerima manfaat dari keberadaan kawasan hutan. Selain itu, dengan adanya pengelolaan kawasan hutan bersama dengan masyarakat, dapat meningkatkan keamanan kawasan hutan dari upaya-upaya alih fungsi kawasan hutan.

Perlu dilakukan upaya pengembangan kegiatan pengelolaan KHDTK Kepau Jaya mengingat masih terdapat potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti pengembangan budidaya lebah madu di KHDTK Kepau Jaya tentunya dengan memperhatikan ketersediaan pakan dari lebah tersebut. Tanaman pohon penghasil buah dan nektar bisa menjadi alternatif pendamping tanaman hutan dalam skema agroforestri. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani juga diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan beserta jajaran manajemennya dan pengelola KHDTK Kepau Jaya yang telah meluangkan waktu untuk memberi motivasi kepada penulis. Selanjutnya kepada Perangkat Aparatur Daerah (RT, RW, Kepala Dusun Suka Maju dan Kepala Desa Kepau Jaya), serta masyarakat sekitar KDHTK Kepau Jaya yang telah meluangkan waktu dalam pengambilan data. Diakhiri dengan apresiasi dan terimakasih atas dedikasi tim penelitian dan pengembangan aspek resolusi konflik dan pemberdayaan masyarakat di KHDTK Kepau Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina, Y., Nurrochman, D. R., Darusman, D., & Sundawati, L. (2015). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 12(2), 105–118.
- Amal, Maru, R., & Side, S. (2020). Community Perception in Management of Mangrove Forest Areas as A Production Area in Luwu District. *La Geografia*, 18(2), 150–159.
- Ardiyansyah, M. (2018). Kehidupan Masyarakat Transmigran Suku Jawa Desa Satuan Pemukiman 1 Makarti Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah 1996-2005.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2017). Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. In *Badan Pusat Statistik*. BPS Kabupaten Kampar. <https://semarangkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>
- BPS Kabupaten Kampar. (2018). *Kecamatan Siak Hulu Dalam Angka 2018* (BPS Kabupaten Kampar (ed.)). BPS Kabupaten Kampar.
- Dewi, I.N., Awang, S.A., Andayani, W., Suryanto, P. (2018). Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan* 12: 86-98.
- Diarto, Hendrarto, B., & Suryoko, S. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(1), 1–7.
- Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). (2016). Mendukung Resolusi Konflik Kehutanan di Indonesia Melalui Mediasi: Pengalaman Proses Multi-Pihak Pada Tingkat Lokal dan Nasional di Kalimantan. *Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 1–8.
- Garsetiasih, R., & Alikodra, H. S. (2015). Manajemen Konflik Konservasi Banteng (*Bos javanicus* D’Alton 1823) di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(3), 213–234.
- Hamid, R., Zulkarnaini, & Saam, Z. (2011). Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan Pasca Kegiatan HPH PT. Siak Raya Timber Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 5(2), 130–148.
- Harun, M. K., & Dwiprabowo, H. (2014). Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 265–280. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.4.265-280>
- Hutajulu, J. P. (2015). Analisis Peran Perempuan Dalam Pertanian di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 4(1), 83–90.

- Ichsan, A. C., Silamon, R. F., Anwar, H., & Setiawan, B. (2013). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Senaru dengan Menggunakan Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Hutan Tropis*, 1(3), 215–220.
- Kurniasih, P., & Sudarmalik. (2013). *Kajian Aspek Legalitas dan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Tepi Kawasan KHDTK Kepau Jaya Dalam Proses Pengelolaan KHDTK Kepau Jaya*. Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan.
- Kurniawan, H. dan Pujiono, E. 2018. Potensi Pengembangan Tanaman Setempat dalam Sistem Agroforestri: Studi Kasus di Desa T'eba Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Faloak*, Vol.2, No.1 April 2018: 71-87
- Larson, A. M. (2013). *Hak Tenurial dan Akses Ke Hutan: Manual pelatihan untuk penelitian*. Center for International Forestry Research. Bogor.
- Mahfud Mochtar. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan KHDTK*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan. <https://www.forda-mof.org>
- Mayers, J., Morrison, E., Rolington, L., Kate, S., & Turrall, S. (2013). *Improving Governance Forest Tenure: Technical Guide 2*. Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Mayrowani, H. (2011). Pengembangan agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani sekitar hutan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29, No. 2: 83-98.
- Mulyono, M. M. B. (2012). *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Kebun Hutan (Dukuh) di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Nasution. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Prasetyo, E. (2015). Analisis Aspek Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Kepau Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau Berdasarkan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. In *perpustakaan.uns.ac.id*. Universitas Sebelas Maret.
- Rajati, T., Kusmana, C., Darusman, D., & Saefuddin, A. (2006). Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kehutanan Dalam Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan: Studi Kasus di Kabupaten. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, XII(1), 38–50.
- Rahardjo, Mudjia (2011) *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.
- Reski, N. A., Yusran, Y., & Makkarennu. (2017). Rancangan Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 9(1), 37–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v9i1.2039>
- Reza, M., Noer, M., Yonariza, & Asmawi. (2019). Hubungan Ikatan Anggota Kelompok Tani dengan Partisipasinya pada Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Penyuluhan*, 15(1), 17–23. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v15i1.16355>

- Safe'i, R., Febryano, I. G., & Aminah, L. N. (2018). Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Sosiohumaniora*, 20(2), 109–114.
- Senoaji, G. (2011). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu. *Sosiohumaniora*, 13(1), 1–17.
- Shafira, & Listiara, A. (2017). Usia Dan Masa Kerja. *Jurnal Empati*, 6(1), 396–400.
- Sulistya Ekawati. (2019). Prolog : Perkembangan Konflik Kehutanan Di Indonesia. dalam S. Ekawati, S. Adiwibowo, & S. Anwar (Eds.), *Meretas Jalan Konflik Kehutanan* (pp. 1–18). PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan. (2005). *Penunjukan KHDTK Kepau Jaya* (SK Menhut No.74/Menhut-II/2005)
- Surat Keputusan Gubernur Riau. (2019). *Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2019* (SK Gubernur Riau no. kpts.949/XI/2018)
- Tjiptoherijanto, P. (2001). Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Majalah Perencanaan Pembangunan*, 23, 1–10.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.v013iss1pp47-55>
- Wakka, A. K., Awang, S. A., Purwanto, R. H., & Poedjirahajoe, E. (2012). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 19(1), 1–11.
- Wakka, A. K., & Bisjoe, A. R. H. (2018). Peningkatan Modal Sosial Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi: Kasus KHDTK Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 79–92.
- Yanto, E. W. B. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Konservasi Hutan. *Journal of Educational Social Studies*, 2(1).
- Yunianto, A. S., & Raharjo, K. D. (2019). Analisis dan Upaya Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan di KHDTK Kepau Jaya. In S. Ekawati, B. K. Sumirat, Subarudi, & S. Anwar (Eds.), *Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)* (pp. 109–124). PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Yunianto, A. S., & Sutrisno, E. (2019). Pembentukan kelompok tani hutan sebagai upaya resolusi konflik melalui konsep pemberdayaan masyarakat di KHDTK Kepau Jaya. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 74–82. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.74-82>
- Yuwono, A. P., & Prasodjo, N. W. (2013). Analisis Gender Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2), 131–151. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/9399>
- Zomer RJ, Trabucco A, Coe R, Place F, van Noordwijk M, Xu JC. (2014). *Trees on farms: an update and reanalysis of agroforestry's global extent and socio-ecological characteristics*. Working Paper 179. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program. DOI: 10.5716/WP14064.PDF